

MAKALAH



CORRUPTION : THE REAL TERRORIST!!

Oleh:
Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum
Pimpinan KPK



Norsk Senter for Menneskerettigheter
Norwegian Centre for Human Rights

“Pengarusutamaan Pendekatan HAM dalam Memberantas Korupsi”

Denpasar, 17 Juni 2013



CORRUPTION : THE REAL TERRORIST!!

CRIME AGAINST the HUMANITY

M. Busyro Muqoddas
Pimpinan KPK

KORUPSI : DAMPAK PELEMAHAN TERHADAP DEMOKRASI & PEMENUHAN PRINSIP PERADILAN ADIL & FAIR

1.

KORUPSI

1. REFLEKSI KRISIS IDENTITAS OTENTIK MANUSIA DAN DISORIENTASI HIDUP.
2. KRISIS AKHLAK DAN MORAL KELUARGA
3. MELUASNYA PERMISIVITAS MASYARAKAT EFEK MONEY POLITIC
4. LEMAHNYA KONTROL SOSIAL
5. MENGUAT DAN MASSIFNYA PERILAKU PRAGMATIS HEDONIS
6. UNSUR FRAUD DALAM SISTEM BIROKRASI (C=D+M-A)
7. TIDAK BERFUNGSIONYA MORALITAS DEMOKRASI
8. PELEMAHAN FUNGSI APARAT PENEGAK HUKUM DAN KRISIS INTEGRITAS APARAT PENEGAK HUKUM
9. TIDAK EFEKTIFNYA PRINSIP SEPARATION OF POWER (TRIAS POLITICA)

2. PETA KORUPSI DI INDONESIA :

A. SEKTOR KORUPSI

1. BANSOS
2. APBN-APBD (BANGGAR, SATUAN TIGA= BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA)
3. HUTAN
4. PAJAK (REVENUE), ENERGI, PANGAN (BENIH, PUPUK, BUAH, SAYUR, DAGING, GULA, BERAS, KEDELAI, JAGUNG).
5. KEBIJAKAN PUBLIK (DAU, REVISI APBD, PERJINAN TAMBANG, MODAL, DLL)
6. IZIN IMPORTASI
7. PENGADAAN BARANG JASA
8. REKRUTMEN CPNS DAN PEJABAT PUBLIK
9. MAFIA HUKUM DAN MAFIA PERADILAN
10. PUNGUTAN DAERAH, TENDER PROYEK
11. PENJUALAN IZIN (TAMBANG, SAWIT, LAHAN, APARTEMEN DAN BISNIS LAINNYA)

B. KLASIFIKASI KORUPSI

1. KORUPSI KARENA KEBUTUHAN (CORRUPTION BY NEED)
2. KORUPSI KARENA KARAKTER SERAKAH (CORRUPTION BY GREED)
3. KORUPSI MELALUI PERENCANAAN (CORRUPTION BY DESIGN)
4. KORUPSI PERADILAN (CORRUPTION OF JUDICIARY=MAFIA PERADILAN)

C. AKTOR KORUPSI

1. BIROKRAT PUSAT DAERAH
2. PEBISNIS NASIONAL-INTERNASIONAL
3. POLITISI PUSAT DAERAH
4. CALO KASUS
5. CALO ANGGARAN
6. PENEGAK HUKUM
7. CUKONG PROYEK DAN CUKONG POLITIK

3. DEMOKRASI : KORBAN KORUPSI

A. FUNGSI DEMOKRASI

1. DISTRIBUSI POLITICAL RESOURCES SECARA FAIR.
2. PEMERATAAN SUMBERDAYA POLITIK.
3. PENYETARAAN HAM SIPOL-EKOSOB RAKYAT SEBAGAI YANG BERDAULAT.
4. PENGONTROL KEKUATAN POLITIK YANG MENYELEWENG
5. PENGENDALI PRAKTEK EKONOMI KAPITALISME PASAR SEBAGAI ANCAMAN DEMOKRASI.
6. KATALISATOR CIVIL BARGAIN versus POLITICAL & BUSINESS COMMUNITY.

B. REALITAS DEMOKRASI :

1. ALAT PARPOL PRAGMATIS UTK KEPENTINGAN KEKUASAAN SEMATA.
2. TIDAK MEMILIKI KONSEP KONTEKS MASYARAKAT & BUDAYA RAKYAT.
3. TIDAK DIPAHAMI OLEH ELIT POLITIK & RAKYAT
4. MENJADI KORBAN PERMAINAN PRAGMATISME POLITIK :
 - 4.1. DI DISFUNGSI DALAM PERAN DEMOKRATISASI HAK-HAK PETANI PETERNAK (KASUS IMPORT SAYUR, BUAH DAN DAGING DLL)
 - 4.2. PEREKRUTAN ANGGOTA PARPOL DAN PEJABAT PUBLIK YANG MONEY POLITICS, NEPOTIS DAN OLIGARKIS
 - 4.3. KESEPAKATAN POLITIK PRAGMATIS (KABINET KOALISI, CALO BANGGAR)
 - 4.4. ALAT KAPITALISME PASAR BEBAS
5. BELUM DIFUNGSIKAN UNTUK MENGHASILKAN PRODUK POLITIK YANG JUJUR & FAIR (SELEKSI CALON PEJABAT PUBLIK DI DPR) KARENA FAKTOR TRANSAKSIONAL

4.

PERADILAN TIDAK ADIL & FAIR

- 1. MANIPULASI FAKTA DAN BUKTI.**
- 2. MANIPULASI PEGERTIAN ETIS YURIDIS UNTUK DALIL BAP, DAKWAAN, PEMBELAAN DAN VONIS.**
- 3. MENTAL MALAS BACA, TELITI DAN AKUNTABEL.**
- 4. ALAT KEKUATAN POLITIK DAN BISNIS.**
- 5. *UN-PROFESSIONAL CONDUCT.***
- 6. KRISIS RITUALITAS DENGAN DAMPAK : SPIRITUALITAS DAN INTELEKTUALITAS RENDAH.**
- 7. KORBAN BUDAYA FEODALISME DAN PATRONASME.**
- 8. TIDAK MEMAHAMI KONSEP PUTUSAN SEBAGAI *TOOL OF SOCIAL JUSTICE* DAN *DEMOCRATIZATION PROCESS + HUMAN RIGHT ENFORCEMENT.***

DAMPAK KORUPSI TERHADAP DEMOKRASI & PERADILAN ADIL DAN FAIR

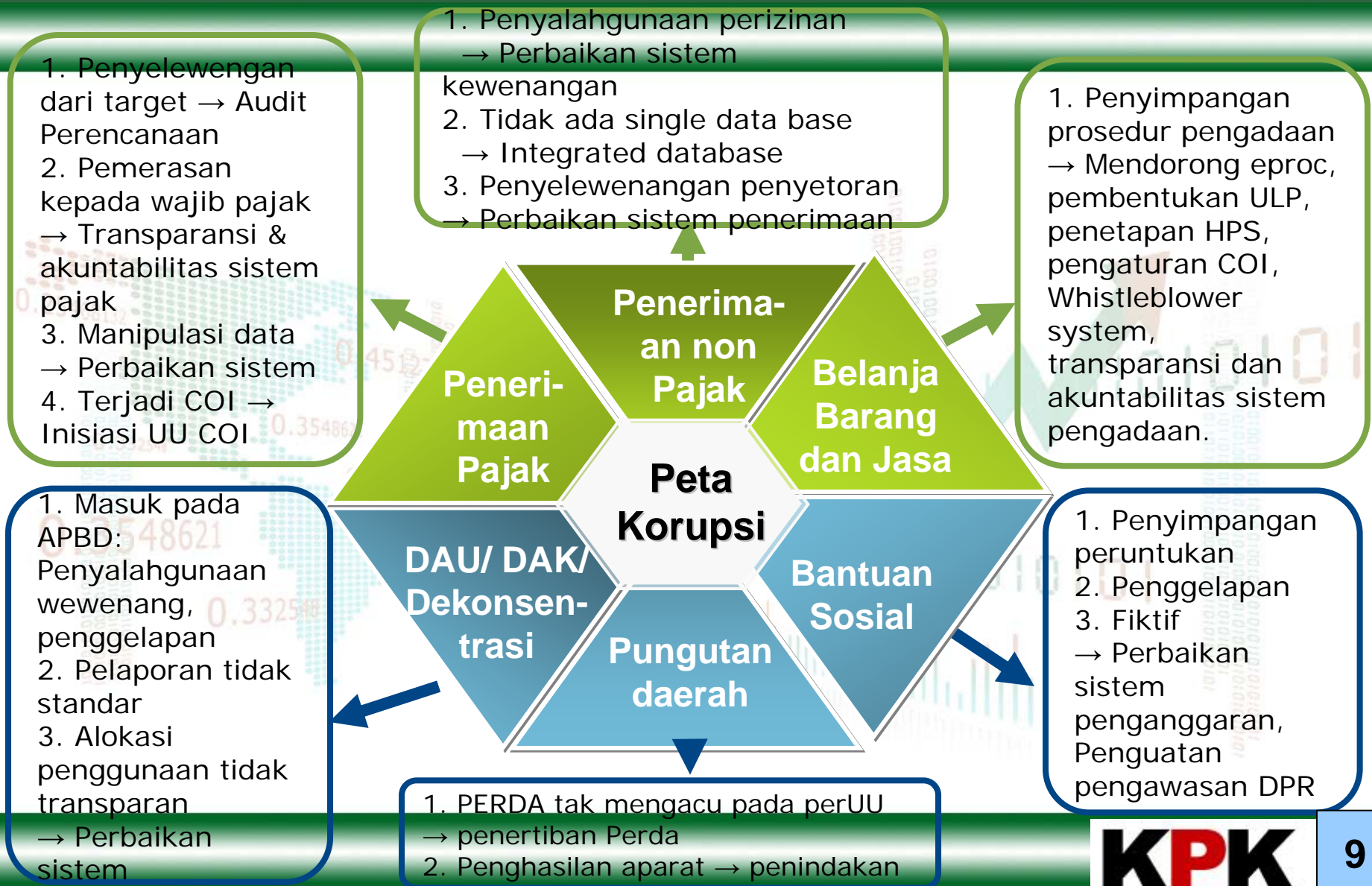
5.

1. Demokrasi MENDISTRIBUSIKAN SDM POLITISI, BIROKRASI & PENEGAK HUKUM.
2. KORUPSI MEROBEK MARWAH INSTITUSI POLITIK, PEMERINTAH, KEKUASAAN KEHAKIMAN & MASYARAKAT AKAR RUMPUT.
3. PUBLIC DISTRUST TERHADAP APARAT NEGARA, MENGUATNYA PREMANISME
4. KONFLIK HORIZONTAL AKIBAT DISTRIBUSI & ALOKASI HAM SIPOL EKOSOB YG TRANSAKSIONAL.
5. MENCIPTAKAN KERAWANAN SOSIAL POLITIK KEAMANAN & SUBVERSIF.
6. PEMBUSUKAN SUBTANSI & KONSTRUKSI TATANAN NILAI AGAMA, PANCASILA & BUDAYA BANGSA.

7. TAMPILNYA IDEOLOGI (LAMA-LAMA MENJADI FALSFAH) PRAGMATISME, PEMALAS DALAM KEJUJURAN & PENYEMBAH HARTA (HEDONISME)
8. LULUH LANTAKNYA KEMANUSIAAN FITRAH/ OTENTIK & RUMAH TANGGA
9. ROBOHNYA THE RULE OF LAW, DEMOKRASI DAN HAM



Peta Korupsi di Indonesia



Perkara Korupsi yang ditangani KPK

JENIS PERKARA	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	JUMLAH
Pengadaan Barang/Jasa	2	12	8	14	18	16	16	10	96
Perijinan			5	1	3	1		0	10
Penyuapan		7	2	4	13	12	19	25	82
Pungutan			7	2	3			0	12
Penyalahgunaan Anggaran			5	3	10	8	5	4	35
JUMLAH	2	19	27	24	47	37	40	39	235

Potensi TPK dari Pengaduan Masyarakat

No	Delik TPK	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Jumlah
1	Benturan kepentingan dalam pengadaan	-	-	-	-	105	123	100	144	472
2	Gratifikasi	-	-	-	-	63	35	48	52	198
3	Pemerasan	-	-	-	-	209	74	96	72	451
4	Penggelapan dalam jabatan	-	-	-	-	198	122	73	67	460
5	Penyuapan	-	-	-	-	232	124	196	237	789
6	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	2,564	1,514	1,521	1,524	7,123
7	Perbuatan Curang	-	-	-	-	87	37	26	28	178
8	Pidana lainnya terkait TPK	-	-	-	-	410	184	135	180	909
9	Lainnya					1,306	748	541	2,463	5,058
10	Belum diklasifikasikan	2,281	7,361	6,939	6,510	3,525	4,285	3,529	5,556	35,985





Penanganan Kasus TPK oleh KPK 2004 – 2013 (Maret)

NO	JABATAN	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	JUMLAH
1	Anggota DPR dan DPRD				2	7	8	27	5	16	6	71
2	Kepala Lembaga/Kementerian		1	1		1	1	2		1		7
3	Duta Besar				2	1		1				4
4	Komisioner		3	2	1	1						7
5	Gubernur	1		2		2	2	1			1	9
6	Walikota/Bupati dan Wakil			3	7	5	5	4	4	4		32
7	Eselon I, II dan III	2	9	15	10	22	14	12	15	8	3	110
8	Hakim							1	2	2	1	6
9	Swasta	1	4	5	3	12	11	8	10	16	5	75
10	Lain-lain		6	1	2	4	4	9	3	3	1	33
	JUMLAH	4	23	29	27	55	45	65	39	50	17	354

Korupsi

Bibit Samad Rianto, dalam Bukunya 'Koruptor Go To Hell' (2009), **korupsi** adalah:

- Perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan publik yang merugikan negara atau masyarakat.
- Perbuatan korupsi haruslah memenuhi 4 unsur : 1). Niat melakukan korupsi (*desire to act*), 2). Kemampuan untuk berbuat korupsi (*ability to act*), 3). Peluang atau kesempatan untuk melakukan korupsi (*opportunity to do corruption*), 4). Target atau adanya sasaran untuk dikorupsi (*suitable target*).
- **Robert Klitgaard :**

$$C = D + M - A$$

Corruption = Discretionary + Monopoly – Accountability

Korupsi dapat terjadi jika ada monopoli kekuasaan yang dipegang oleh seseorang yang memiliki kemerdekaan bertindak atau wewenang yang berlebihan, tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas.

Modus Korupsi di Indonesia

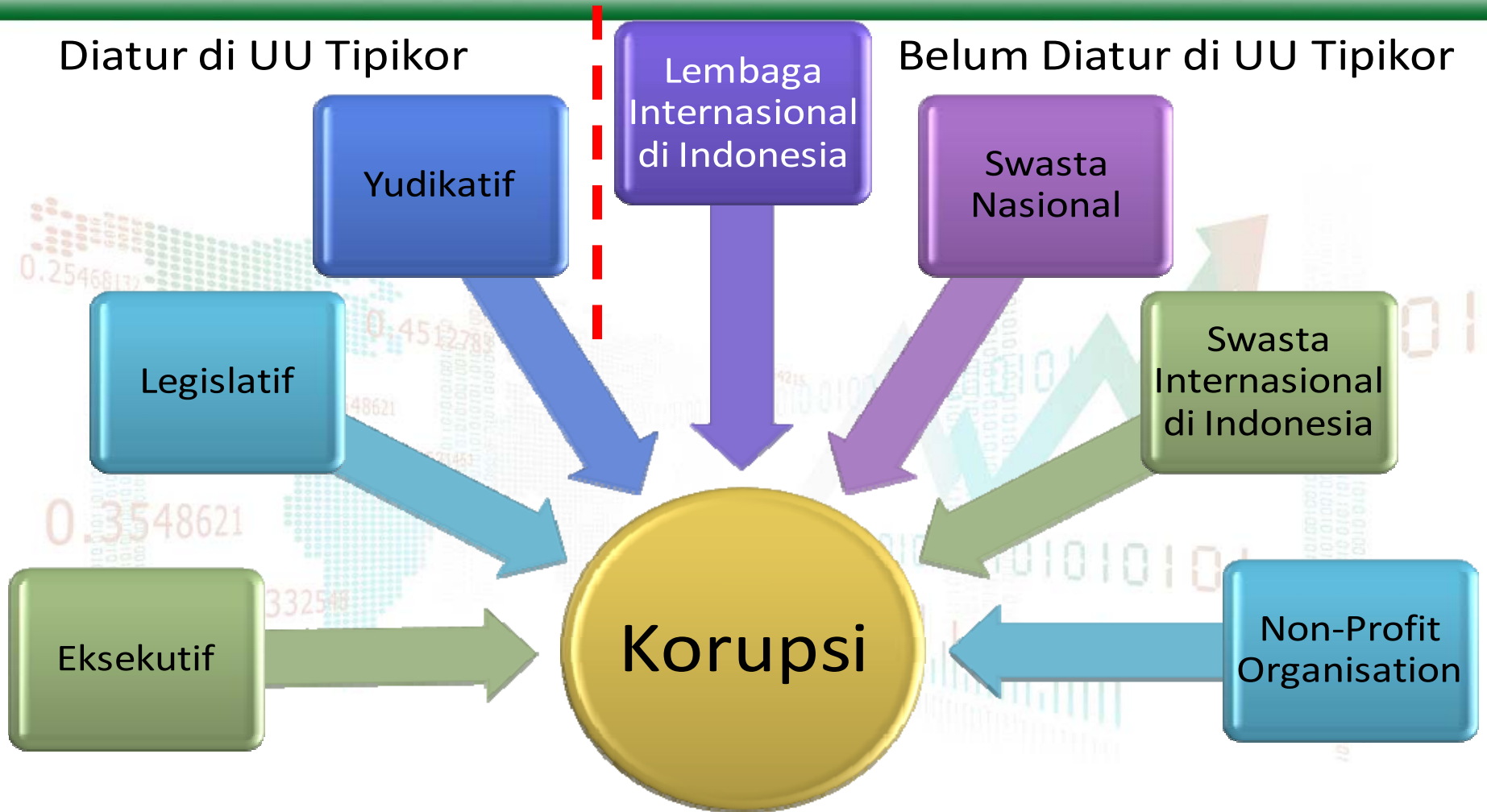
Jenis Korupsi



Pilar Korupsi

Modus Korupsi

Belum semua dapat terjangkau!



SUAP DI LEMBAGA PERADILAN

Puluhan hakim berhasil tertangkap tangan saat menerima suap. Namun jeratan hukum yang dijatuhkan tidak menjadikan efek jera. Satu hakim kembali tertangkap tangan oleh KPK terkait kasus serupa.



1
Juli
2011

Imas Dianasari,
Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung.

Imas tertangkap tangan menerima suap dari Manajer Administrasi PT. Onamba Indonesia (OI), Odi Juanda, senilai Rp200 juta dalam pengurusan kasus di Mahkamah Agung.



17
Agustus
2012

Heru Kusbandono,
Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Pontianak.

Keduanya terbukti menerima suap dari Sri Dartuti masing-masing sebanyak Rp100 juta dan Rp50 juta. Tujuan menyuap untuk memuluskan proses pemeriksaan seorang pejabat tinggi di daerah Semarang yang perkaranya sedang diperiksa di Pengadilan Tipikor Semarang.



Setyabudi Tedjocahyono,
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung.

Ditangkap karena diduga menerima suap Rp150 juta dari Rp1 miliar yang dijanjikan. Penangkapan terkait putusan kasus korupsi dana bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung, senilai Rp66,6 miliar.

22
Maret
2013



Kartini Marpaung,
Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Semarang.



KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Thank You!

0.25468132
0.3325
0.354

10101